

JURNAL

KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS



Diajukan oleh:

Meita Sinaga

NPM : 11 05 10626

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSTAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI
DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS



Diajukan oleh:

Meita Sinaga

NPM : 11 05 10626

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 juli 2015

P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, SH.,LL.M

- I. Judul** : Kebijakan Kepolisian Dalam Menanguglangi Aksi Demonstran Yang Bertindak Anarkis.
- II. Nama** : Meita Sinaga, P.Prasetyo Sidi Purnomo.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- IV. Abstract** : Based on the title of research from the writer about police policy in ward off the protester who act anarchist. Demonstration is giving opinion that is conducted by some people or organization who think that their essence as a Indonesian people aren't fulfilled by judgment or policy which is made by the government or anyone who has a power. Demonstration usually did by a group of university student or the laborer who dislike with their employer treatment but demonstration also did by another group with aim protest. Demonstration often happen with anarchits act or violence that it can be loss result or sacrifice from the police or protester. Eforts from the police for tackling the demonstration, repressive act and preventif act. The problem that's often faced by the police in handling protester action who act the anarchists are there is a provocateur who always trigger the protester to act as they like it and that caused a clash between the police and the protester by throwing stone to the polie , in justice to damage action, support less from sides of society and social media in handling the anarchist action of protester.

The keyword : Police, demonstration, anarchist, law

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya aksi demo sendiri adalah wujud aplikasi dari nilai Pancasila sila ke-4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa dan organisasi tani. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan.¹ Mengenai demonstrasi yang sehat tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi untuk aksi massa/demonstrasi yang ideal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan untuk menetapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat swakarsa dengan berintikan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang profesional, diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Undang-Undang ini dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menyampaikan pendapat di

¹ Hariman Siregar, 1994, Hati Nurani Seorang Demonstran/Hariman Siregar, hlm.26

muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. "

Berdasarkan pasal tersebut, maka masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasi mereka di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan tanpa ragu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. "

Dengan demikian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas(represif) demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan. namun dalam pelaksanaannya, kadangkala Polisi melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang atau Protap. Dalam upaya mengatasi massa demonstran yang anarkis sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan polisi. Polisi sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan yang seakan-akan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat di hentikan dan agar jangan sampai ada korban. Dalam mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, pihak Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Protap Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian hukum yang berjudul “Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstran Yang Bertindak Anarkis”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi demonstran yang anarkis?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi demonstran yang anarkis?

VI. Isi Makala

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. RUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN PENELITIAN
- D. MANFAAT PENELITIAN
- E. KEASLIAN PENELITIAN
- F. BATASAN KONSEP
- G. METODE PENELITIAN
- H. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB II : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI

DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS

- A. UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI AKSI
DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS
- B. KENDALA POLISI DALAM MENANGANI AKSI
DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS

BAB III : PENUTUP

- A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

VII. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya penanggulangan aksi demonstran yang bertindak anarkis, Polda yogyakarta melakukan upaya sebagai berikut;
 - a. upaya melalui pendekatan dan kerjasama
kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak demonstran, Kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak universitas atau pihak sekolah, membuat perjanjian yang jelas dan tegas antara kordinator lapangan demonstran dengan pihak kepolisian.
 - b. Upaya perlengkapan pihak kepolisian
Polisi harus melengkapi sarana dan prasarana sebelum melakukan penanganan unjuk rasa, pihak kepolisan harus membina dan mendidik calon-calon polisi agar memiliki sikap yang bisa memahami kemauan para pengunjung rasa, pihak kepolisian harus memiliki stamina yang kuat dan sehat agar di lapangan bisa berjaga-jaga dengan maksimal.
 - c. Melakukan penanganan dengan cara:
 - a) Tindakan represif (melakukan negosiasi, mengarahkan ton dalmas, kepolisian melakukan penyusupan, mengisolasi

massa agar tidak bergabung dengan penonton, membubarkan massa.)

b) Tindakan preventif (penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi)

2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani aksi demonstran yang bertindak anarkis adalah sebagai berikut:

- a. Adanya provokator yang selalu membuat para demonstran memicu untuk bertindak sesuka hati yang mengakibatkan adanya bentrok antara polisi dan para demonstran dengan saling melempar batu kepada polisi.
- b. Ketidakpedulian terhadap tindakan yang merugikan.
- c. Kuarangnya dukungan dari para pihak masyarakat dan media massa dalam menangani aksi demonstran yang anarkis.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Hariman Siregar, 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*/Hariman Siregar, Jakarta.

Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta

Mochtar Buchori, 2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*, jogja-sleman

Humaidi SU, *Mengenal Ilmu Kebijakan Publik*, Pasuruan Garoeda buana
indah 1993

Website

<http://mediainformasill.blogspot.com/2015/09/pengertian-definisi-anarkisme.html>, 9 Maret 2015

[http://www.Demonstrasi Bukan Anarkisme - Negara Hukum.htm](http://www.DemonstrasiBukanAnarkisme-NegaraHukum.htm).

Peraturan Perundang-Undangan

UUD.

KUHP.

UU No 9 Tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum .

UU No 2 Tahun 2002 kepolisian.

UU No 39 Tahun 99 hak asasi manusia.

Perkap No 1 Tahun 2009 mengenai penggunaan ke kuatan dalam tindakan kepolisian.

Perkap No 8 Tahun 2010 mengenai tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara.

Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa.